



BERDIRINYA PEMERINTAHAN DESA BUNISEURI

**Dalam Upaya Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat**

Penulis :
Andang Andi Dkk



**BERDIRINYA PEMERINTAHAN DESA
BUNISEURI DALAM UPAYA PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

BERDIRINYA PEMERINTAHAN DESA BUNISEURI DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

H. Andang Andi, SH., S. Pd., M. M.

H. Rusmana, S. H.

Maman Isak Juharman, A.Ma



BERDIRINYA PEMERINTAHAN DESA BUNISEURI DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis:

H. Andang Andi, SH., S. Pd., M. M.

H. Rusmana, S. H.

Maman Isak Juharman, A.Ma

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : April 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

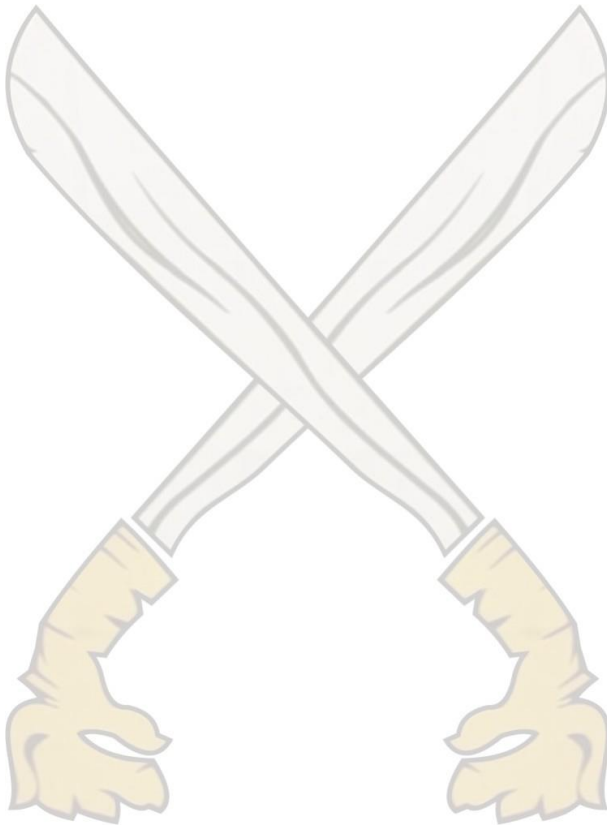
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *"Berdirinya Pemerintahan Desa Buniseuri dalam Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan awal berdirinya Pemerintahan Desa Buniseuri, serta peran strategis yang dijalankan dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Buniseuri merupakan salah satu entitas pemerintahan desa yang memiliki potensi luar biasa, baik dari segi sumber daya alam, sosial budaya, maupun semangat gotong royong warganya. Kehadiran pemerintahan desa menjadi titik tolak penting dalam mengorganisasi kekuatan masyarakat untuk bergerak bersama dalam mewujudkan kemajuan desa yang mandiri, berdaya, dan berkeadilan. Buku ini berupaya menggambarkan dinamika sejarah, tantangan, serta capaian yang telah diraih sejak awal pembentukan desa hingga pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

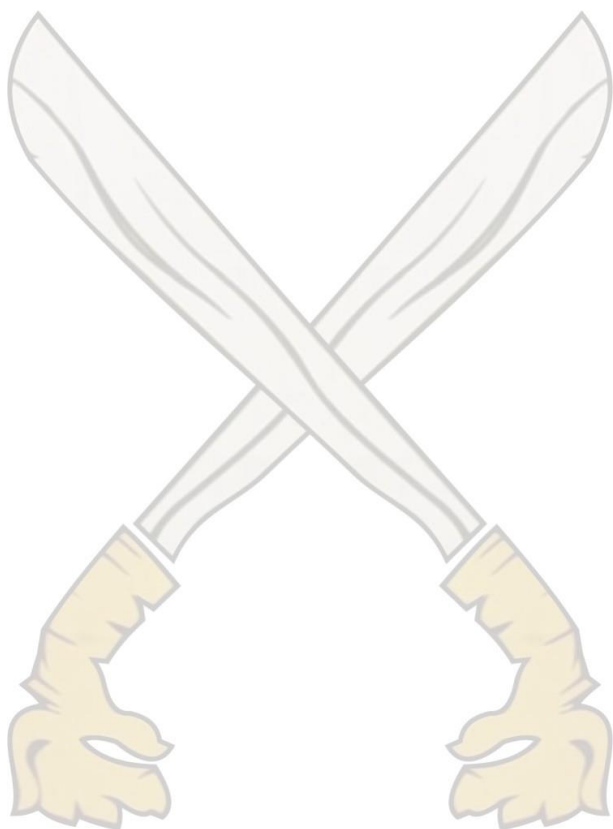
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan menjadi bahan

pembelajaran bagi pembaca, khususnya bagi pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENGANTAR	1
 BAB II ASAL USUL BUNISEURI	 4
A. Wilayah Galuh bagian dari Kesultanan Cirebon	8
B. Priangan dibawah kekuasaan Mataram dan VOC	12
C. Pembentukan Priangan	24
D. Masa pemerintahan Hindia Belanda	29
E. Desa dari Masa Pemerintahan Jepang dan Kemerdekaan R.I. sampai Era Reformasi	34
 BAB III HAKIKAT SEJARAH	 45
A. Pengertian Sejarah	45
B. Pendekatan Metodologi Sejarah	46
C. Tahapan Metodologi Sejarah	47
 BAB IV DESA BUNISEURI DARI AWAL SAMPAI SEKARANG	 52
A. Tradisi dan Budaya	70
B. Situs Makam-makam keramat di Desa	79
C. Penyebaran Islam ke Buniseuri dan sekitarnya	107
DAFTAR PUSTAKA	112



BAB I

PENGANTAR

Asal usul berdirinya sebuah Desa, atau sebagai tempat kelompok bertempat tinggal. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik yang masih ada ikatan tali darah atau keluarga maupun bukan. Sehingga dapat terjalin sebuah interaksi sosial diantara kelompok tersebut, yang sama-sama saling menopang dalam urusan dan hubungan kepentingannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Menurut Bintaro (1968: 95) mengemukakan bahwa "desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Bouman (1971: 79), mengemukakan pendapatnya : "Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal: kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu

terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial".

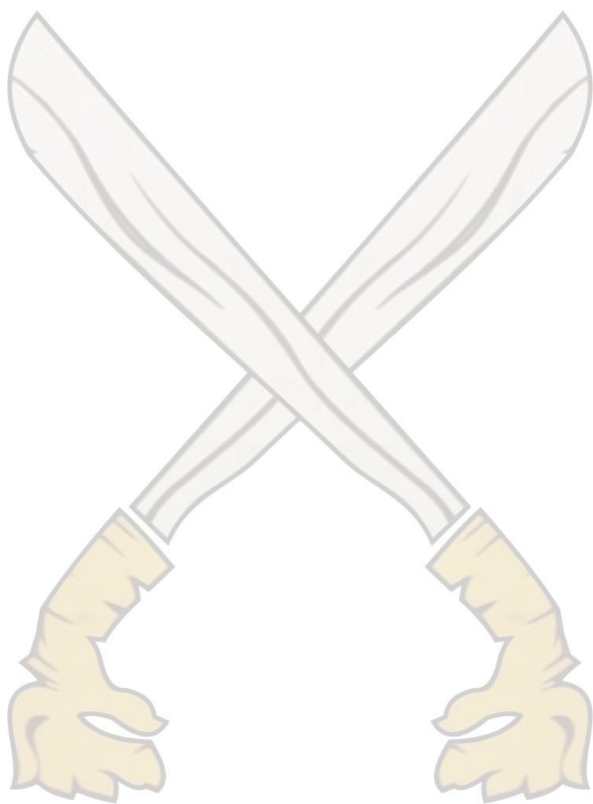
Desa Buniseuri, berada di wilayah administratif Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Mengenai kapan berdirinya atau terbentuknya pemerintahan Desa Buniseuri, sampai saat ini belum ada yang menjelaskan atau belum di ketahui, sejak kapan Desa Buniseuri berdiri. Bahkan secara toponimi nama Buniseuri itu sendiri, belum ada yang mengetahui secara pasti.

Sehingga tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya, untuk mengetahui sejarah Desa Buniseuri. Siapa yang sesungguhnya mulai membuka daerah Buniseuri, dan kenapa di sebut Buniseuri, termasuk asal usulnya sampai sekarang perlu di lakukan penelusuran dan pengkajian lebih jauh mengenai keberadaan Desa Buniseuri, termasuk mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Melihat latar belakang tersebut diatas, belum ada bukti-bukti otentik yang dapat menjelaskan sejarah Desa Buniseuri sampai keadaanya sekarang.

Untuk itu penulis punya ketertarikan guna mengkaji dan meneliti permasalahannya. Adapun upaya-upaya yang di lakukan untuk mendapatkan informasi tersebut, yaitu dengan membentuk Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa Buniseuri Nomor 400.6.4.2./Kpts.10-Ds/II/2025 tanggal 25 Pebruari 2025 tentang Penyusunan Sejarah dan Milangkala Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Dengan usaha dan upaya melakukan observasi, wawancara kepada pihak yang dianggap sebagai sumber informasi, maupun dari peninggalan-peninggalan sejarahnya dan literatur maupun referensi.



BAB II

ASAL USUL BUNISEURI

Menurut Asria Sadda dalam Lima Toponimi Potensi Cagar Budaya Di Kabupaten Maros : Kajian Onomastik, Program Studi Magister Ilmu Linguistik Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makasar 2023, menjelaskan bahwa pengetahuan yang menyangkut segala sesuatu berkenaan dengan nama, terutama yang berkenaan dengan toponimi disebut dengan “onomastik”. Onomastik biasanya dibagi menjadi dua cabang yang diberberapa negara sudah berkembang menjadi bidang kajian sendiri yaitu antroponim dan toponim. Antroponim yaitu pengetahuan yang mengkaji riwayat asal-usul nama orang atau yang diorangkan, sedangkan toponim yaitu pengetahuan yang mengkaji riwayat atau asal-usul suatu tempat (Rais, 2008: 53-54)

Berdasarkan dari beberapa informasi dan cerita secara turun temurun serta dari hasil penelusuran melalui tokoh-tokoh masyarakat, yang dapat memberikan banyak informasi tentang keadaan dan kehidupan masa lalu di Desa Buniseuri, dahulunya adalah hutan belantara.

Melalui catatan hasil penelusuran Dadan Danumaya, yang bersumber dari Ibu Eha Dusun Citanjung Desa Buniseuri, menjelaskan dahulunya di daerah Citanjung terdapat sebuah pesantren disekitar Batu Cupu. Pesantren Batu Cupu dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ki Purnojati berasal dari Cirebon. Ki Purnojati memiliki misi menyebarkan Islam di daerah Citanjung. Pada suatu saat Ki Purnojati mendapatkan undangan dari Cirebon untuk

melakukan penyerangan dan menyebarkan Islam lebih jauh ke wilayah Galuh. Sehubungan pada saat itu wilayah Galuh masih menganut Hindu. Setelah musyawarah dan pembahasan selesai di Cirebon, selanjutnya Ki Purnojati kembali pulang menuju pesantren Batu Cupu di Citanjung. Saat waktunya tiba, pasukan Cirebon akan menuju ke Galuh singgah terlebih dahulu di Cibuniseuri, yaitu untuk melakukan perjanjian dengan Ki Purnojati bagaimana persiapan penyerangan ke Galuh. Namun pada kesempatan pasukan Cirebon singgah di Cibuniseuri, Ki Purnojati tidak berada ditempat entah kemana. Hanya mendapatkan suara yang tanpa wujud, yaitu terdengar suara tertawa-tawa dari arah sumber mata air sumur Cibuniseuri. Dengan perasaan jengkel, salah seorang pasukan dari Cirebon melemparkan pedangnya ke arah tengah sumber mata air sumur Cibuniseuri tersebut. Tak lama kemudian, pasukan Cirebon meninggalkan Cibuniseuri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Galuh (Ciamis sekarang). Sehingga khususnya masyarakat di Citanjung , memaknai asal suara yang tertawa-tawa dari arah sumber mata air Cibuniseuri, ditafsirkan dalam Bahasa Sunda : “ seuri di nu buni “, dalam Bahasa Indonesia : “ tertawa sambil bersembunyi “.

Demikian juga bahwa keberadaan Desa Buniseuri tidak terlepas dari ketokohan Bapak Bedog alias *Jaka Lalana* (sebutan di masyarakat Buniseuri). Bapak Bedog merupakan pengembara atau pengelana menurut tradisi lisan, yang membuka hutan belantara didaerah Cibuniseuri dahulu kala. Kisah tersebut masih beredar ditelinga masyarakat sampai saat ini.

Dengan kehadiran Bapak Bedog yang membuka hutan dengan cara menebang pohon-pohon besar untuk dijadikan perkampungan, hanya menggunakan sebilah

golok/bedog. Bahkan menurut beberapa sumber informasi benda peninggalan sejarah (temuan arkeologi), seperti bedog (kamus Bahasa Indonesia : *golok*), mata tombak, senjata cis, dll, masih tersimpan di beberapa warga masyarakat Buniseuri dan Muktisari dan sekitarnya, maupun yang masih ada hubungan keturunannya.

Ketokohan Bapak Bedog masih ada kaitan dengan sejarah ketokohan daerah lainnya sebelum menjadi Desa Buniseuri yang sekarang sudah pemekaran, seperti yang ada di wilayah desa tetangga lainnya yaitu diantaranya Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

Perluasan kekuasaan Cirebon ke Galuh, tidak terlepas dari peran ulama Cirebon yang di utus untuk penyebaran Islam di bekas Kerajaan Galuh dahulunya, yaitu mulai dari Kawali, Cipaku, Bangbayang, Cipaku, Cieurih, Jalatrang, Sukamulya, Saguling, Jelat, maupun Baregbeg.

Wilayah Buniseuri yang di maksud sekarang, sebetulnya sudah ada sejak dari dahulu sebelum kehadirannya Bapak Bedog. Karena wilayah Buniseuri sebelumnya terdapat wilayah Urug dan disatukan ke Buniseuri, sehingga dahulu masih bercampurnya berbagai adat dan budaya baik masyarakat asli maupun pendatang, yang kebiasaan-kebiasannya masih ada sejak dari pendahulunya sebelum Islam masuk ke wilayah Galuh. Bapak Bedog mulai membuka wilayah Buniseuri saat itu, tidak sepenuhnya menggunakan cara sebagai ulama, tetapi menggunakan cara budaya dan kearifan lokal setempat (*local wisdom*)

Bapak Bedog pertama membuka daerah yaitu di Cibuniseuri, karena sumber mata airnya (arti kata *tampian*, Bahasa Sunda adalah, tempat mandi di sungai atau pancuran), kemudian pindah ke sebelah timur yaitu ke sumber mata air Cihaur, namun karena sumber mata airnya di anggap

kurang memadai juga dan selanjutnya pindah lagi ke Ciwindu dan terakhir di Cipeuteuy blok Sela Honje yang memiliki sumber mata airnya cukup banyak.

Bapak Bedog memiliki nama Brata Kusumah alias *Jaka Lalana* merupakan puteranya dari Naga Suta yang asalnya dari daerah Talaga Majalengka. Sebutan bagi masyarakat Buniseuri, *Jaka Lalana* diartikan yaitu seorang laki-laki yang gemar berkelana. *Jaka* dalam Bahasa Jawa, berarti *laki-laki muda* dan *Lalana*, Bahasa Sangsekerta berarti *berkelana atau mengembara*).

Setelah beliau menemukan daerah yang dianggap cocok untuk membuka perkampungan, kemudian mulailah membuka lahan. Pohon yang pertama beliau tebang, yaitu namanya pohon gebang. Namun ketika pohon gebang tersebut roboh, terdengarlah suara orang yang tertawa tetapi orangnya tidak menampakan diri (tidak ada). Bapak Bedog , mengira mungkin orang yang tertawa tersebut merasa gembira karena hutan belantara tersebut akan di jadikan suatu perkampungan. Tidak ada yang dapat menjelaskan berapa lama Bapak Bedog membuka hutan dan sampailah di daerah Dusun Munjul (blok Jambe), dan ke wilayah Desa Muktisari yaitu Dusun Cigebot, Dusun Panyingkiran, dan Dusun Warung Jarak. Semua daerah yang pernah disinggahi dan hutan lebat yang dibuka menjadi perkampungan maupun perkebunan dan lahan pertanian oleh Bapak Bedog, masyarakat yang ada sampai saat ini di sekitar wilayah tersebut sangat mengenal dengan ketokohan Bapak Bedog atau nama lainnya *Jaka Lalana*. Sehingga dengan ketangguhannya Bapak Bedog, sampailah terdengar kepada penguasa di Galuh.

Diwilayah Sela Jambe (blok tanah Jambe), Bapak Bedog membuka hutan untuk perkampungan pertama.

Berdasarkan musyawarah para tokoh ketika itu, bermusyawarah dan bermufakat serta mencapai kesepakatan bahwa nama tempat Sela Jambe (nama blok tanah), di rubah menjadi nama Buniseuri sampai sekarang. Adapun proses pengambilan keputusan perubahan nama tempat Sela Jambe menjadi Buniseuri tersebut, yaitu hari Minggu tanggal 26 Juni 1644 M, yaitu 2 tahun setelah penetapan hari jadi Kabupaten Ciamis. Selain itu, Bapak Bedog memiliki teman-teman seperjuangan sebagai tim nya dalam membuka hutan yaitu diantaranya :

1. Mbah Jaya Dirana, makamnya di Dusun
2. Buniasih Desa Muktisari.
3. Wana Yasa dan Warga Yasa, makamnya di Dusun Warung Jarak Desa Muktisari.
4. Mbah Dalem Sumadinata, di pinggir Sungai Cibuyut.

A. Wilayah Galuh bagian dari Kesultanan Cirebon

Kerajaan Sunda lebih dikenal dengan sebutan “Kerajaan Pajajaran” yang berlangsung selama kurun waktu 97 tahun (1482-1579 M). Kerajaan ini diperintah oleh 6 raja: (1) Maharaja Sri Baduga yang menjadi Maharaja Sunda pertama dan Galuh atau Maharaja Pajajaran yang berkuasa selama 39 tahun; (2) Prabu Surawisesa yang bertahta sebagai Maharaja Pajajaran selama 14 tahun; (3) Prabu Ratudewata yang memerintah sebagai Maharaja Pajajaran selama 8 tahun; (4) Sang Prabhusakti yang menyandang gelar Maharaja Pajajaran selama 8 tahun; (5) Prabu Nilakendra yang menjadi Raja Pajajaran; dan (6) Prabu Ragamulya yang merupakan Raja Pajajaran terakhir yang memerintah selama 16 tahun. Pada tahun 1579 M, Kerajaan Pajajaran lenyap dan melebur menjadi Kesultanan Banten dan Cirebon

(Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora – ISSN 2656-7156 Vol. 5, No. 3, Oktober 2023: 345-354 Raja-Raja Sunda Periode Kerajaan Pajajaran Berdasarkan Tradisi Tulisan Sunda Kuno, Undang Ahmad Darsa, Elis Suryani Nani Sumarlina, Rangga Saptia Mohamad Permana)

Dalam makalah Terbentuknya Keresidenan Priangan, oleh Mumuh Muhsin Z, Program Pascasarjana Fakultas Sastra BKU Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran, 20 November 2008, berdasarkan sumber tradisi, penyerangan Kesultanan Banten ke Kerajaan Pajajaran itu sedikitnya terjadi tiga kali; pertama, dilakukan oleh Sunan Gunung Jati pada masa Kerajaan Pajajaran di bawah pemerintahan Ratu Dewata Buana (1535-1551); kedua, dilakukan oleh Sultan Hasanudin pada masa Kerajaan Pajajaran di bawah pemerintahan Nilakendra (1551-1567); dan ketiga, dilakukan oleh Maulana Yusuf pada masa Kerajaan Pajajaran diperintah oleh Ragamulya (1567-1579) (Danasasmita, 1981: 78-81). Kenyataan itu mengisyaratkan betapa kuatnya Kerajaan Pajajaran; dalam kondisi yang teralienasi selama kurang lebih setengah abad baik secara ideologi, ekonomi maupun politik ia masih menunjukkan kemampuan melakukan perlawanan. Malah, menurut sumber tradisi pula, kemenangan Kesultanan Banten atas Kerajaan Pajajaran itu dimungkinkan oleh pengkhianatan pegawai Kerajaan Pajajaran itu sendiri (Djajadiningrat, 1983: 149; de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1995: 153).

Pasca Kerajaan Pajajaran runtuh oleh Kesultanan Banten, maka wilayah sebelah barat Karawang diambil oleh Kesultanan Banten dan sebelah timur Karawang diserahkan kepada Kesultanan Cirebon (Djajadiningrat, 1983: 98; Faes, 1902: 1).

Pada saat, Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh tahun 1579 M, akibat serangan dari Kesultanan Banten, maka Kesultanan Cirebon menaklukan Raja Galuh (Majalengka), dan Talaga Manggung (Majalengka), selanjutnya membawahi Kerajaan Sunda Kawali.

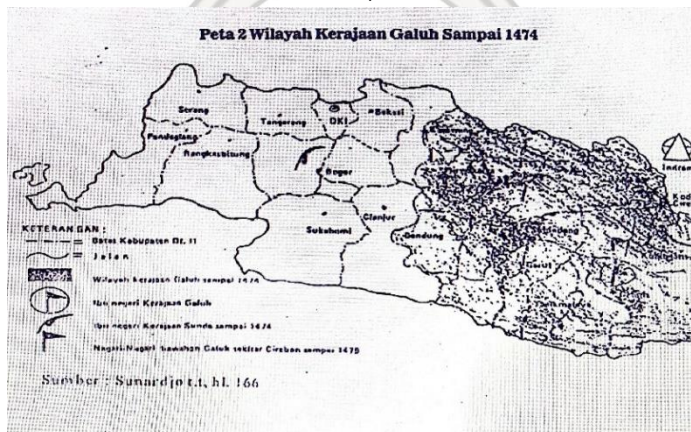
Penyebaran Islam ke wilayah Priangan Timur antara lain ke Galuh pada tahun 1528 dan ke Talaga pada tahun 1530. Memang upaya penyebaran agama Islam tidak semata-mata untuk menyebarkan agama tetapi juga untuk memperluas wilayah (Nina Herlina Lubis (2003: 187).

Menurut Ibi Satibi, dalam Laporan Penelitian Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Adat Pepakem (Studi Atas Kitab Adilulah Kesultanan Cirebon Abad XVIII) Lembaga Penelitian IAIN Syeh Nurjati Cirebon 2013, menjelaskan Susuhunan Jati memerintah di Cirebon tahun 1479. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Cirebon meluas ke daerah pedalaman dengan mengislamkan masyarakatnya. Sejak saat inilah, Cirebon merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdaulat dan tidak lagi di bawah kekuasaan Kerajaan manapun. Daerah-daerah yang dikuasai Cirebon pada masa ini antara lain: diselatan hingga daerah Lurahgung, Kuningan, Talaga dan Galuh; di barat daya, Sindangkasih (Majalengka), Sumedanglarang, Tatar Ukur (Bandung), Cangkuang (Garut), dan Sukapura; di sebelah barat hingga daerah Dermayu, Karawang, Banten, Kalapa, Sagalaherang dan Cabalagung.

Sehingga pada akhirnya, kekuasaan Cirebon pada tahun 1528, dapat menguasai Galuh, (Kawali).



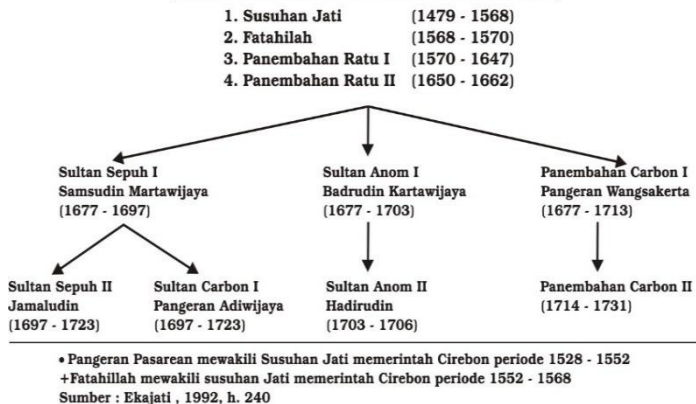
Gambar (6) Peta : Sumber SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL CIREBON Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasiona,2012



Gambar (7) Peta : Sumber SEJARAH KERAJAAN TRADISIONAL CIREBON Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional

Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2012

DAFTAR RAJA/SULTAN CIREBON SAMPAI ABAD KE-17



Gambar (8) Bagan : Raja/Sultan Cirebon

B. Priangan dibawah kekuasaan Mataram dan VOC

Menurut Prof. A. Sobana Hardjasaputra dalam tulisannya Sejarah Kerajaan Galuh (Ciamis), bahwa daerah-daerah di Priangan yang semula berstatus kerajaan berubah menjadi kabupaten. Galuh berada di bawah kekuasaan Mataram antara tahun 1595-1705. Galuh pertama kali jatuh ke dalam kekuasaan Mataram, ketika Mataram diperintah oleh Sutawijaya alias Panembahan Senopati (1586-1601). Oleh penguasa Mataram, Galuh dimasukkan ke dalam wilayah administratif Cirebon. Setelah Prabu Cipta Sanghiang di Galuh meninggal, ia digantikan oleh puteranya bernama Ujang Ngekel bergelar Prabu Galuh Cipta Permana (1610-1618), berkedudukan di Garatengah (daerah sekitar Cineam, sekarang masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya). Prabu

Galuh Cipta Permana yang telah masuk Islam (semula beragama Hindu) menikah dengan puteri Maharaja Kawali bernama Tanduran di Anjung. Selain Garatengah, di wilayah Galuh terdapat pusat-pusat kekuasaan, dikepalai oleh seseorang yang berkedudukan sebagai bupati dalam arti raja kecil. Pusat-pusat kekuasaan itu antara lain Cibatu, Utama (Ciancang), Kertabumi (Bojong Lopang), dan Imbanagara.

Mataram menguasai Galuh kemudian Sumedang Larang (1620) dalam usaha menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanan di bagian barat dalam menghadapi kemungkinan serangan pasukan Banten dan Kompeni yang berkedudukan di Batavia. Kekuasaan Mataram di Galuh lebih tampak ketika Mataram diperintah oleh Sultan Agung (1613-1645) dan Galuh diperintah oleh Adipati Panaekan (1618-1625), putera Prabu Galuh Cipta Permana, selaku Bupati Wedana. Penguasaan Mataram terhadap Galuh dan Sumedang Larang sifatnya berbeda. Galuh dikuasai oleh Mataram melalui cara kekerasan, karena pihak Galuh melakukan perlawanan. Sebaliknya, Sumedang Larang jatuh ke bawah kekuasaan Mataram karena berserah diri, antara lain karena adanya hubungan keluarga antara Raden Aria Suriadiwangsa penguasa Sumedang Larang dengan penguasa Mataram.

Tahun 1628 Mataram merencanakan penyerangan terhadap Kompeni di Batavia dan meminta bantuan para kepala daerah di Priangan. Ternyata rencana itu menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung menjadi perselisihan di antara para kepala daerah di Priangan. Dalam hal ini, Adipati Panaekan berselisih dengan adik iparnya, yaitu Dipati Kertabumi, Bupati Bojonglopong, putera Prabu Dimuntur. Dalam perselisihan itu Adipati Panaekan terbunuh (1625). Ia digantikan oleh puteranya bernama Mas Dipati

Imbanagara yang berkedudukan di Garatengah (Cineam). Pada masa pemerintahan Dipati Imbanagara, ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan dari Garatengah (Cineam) ke Calincing. Tidak lama kemudian pindah lagi ke Bendanegara (Panyingkiran).

Ketika pasukan Mataram menyerang Batavia (1628), kepala daerah di Priangan memberikan bantuan. Pasukan Galuh dipimpin oleh Bagus Sutapura, pasukan Priangan dipimpin oleh Dipati Ukur, Bupati Wedana Priangan. Dipati Ukur memang mendapat tugas khusus dari Sultan Agung untuk mengusir Kompeni dari Batavia. Ternyata Dipati Ukur gagal melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, ia memberontak terhadap Mataram.

Pemberontakan Dipati Ukur yang berlangsung lebih kurang empat tahun (1628-1632) merupakan faktor penting yang mendorong Sultan Agung tahun 1630-an memecah wilayah Priangan di luar Sumedang menjadi beberapa kabupaten, termasuk Galuh. Wilayah Galuh dipecah menjadi beberapa pusat kekuasaan kecil, yaitu Utama diperintah oleh Sutamanggala, Imbanagara diperintah oleh Adipati Jayanagara, Bojong-lopong diperintah oleh Dipati Kertabumi, dan Kawasen diperintah oleh Bagus Sutapura. Khusus kepala-kepala daerah yang berjasa membantu menumpas pemberontakan Dipati Ukur diangkat oleh Sultan Agung menjadi bupati di daerah masing-masing. Tahun 1634 Bagus Sutapura dikukuhkan menjadi Bupati Kawasen. Kepala daerah lain yang diangkat menjadi bupati antara lain Ki Astamanggala (Umbul Cihaurbeuti) menjadi bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Ki Wirawangsa (Umbul Sukakerta) menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha, dan Ki Somahita (Umbul Sindangkasih) menjadi bupati Parakanmuncang dengan gelar

Tumenggung Tanubaya.), (daerah antara Banjarsari – Padaherang). Ia memerintah Kawasen sampai dengan 1653, kemudian digantikan oleh puteranya bernama Tumenggung Sutanangga (1653-1676). Sementara itu, Dipati Imbanagara yang dicurigai oleh pihak Mataram berpihak kepada Dipati Ukur, dijatuhi hukuman mati (1636). Namun puteranya, yaitu Adipati Jayanagara (Mas Bongsar) diangkat menjadi Bupati Garatengah. Imbanagara dijadikan nama kabupaten dan Kawasen digabungkan dengan Imbanagara.

Pertengahan tahun 1642 Adipati Jayanagara memindahkan lagi ibukota Kabupaten Galuh ke Barunay (daerah Imbanagara sekarang). Pemindahan ibukota kabupaten yang terjadi tanggal 14 Mulud tahun He (12 Juni 1642). Selama waktu itu, daerah-daerah kekuasaan lain, yaitu Kawasen, Kertabumi, Utama, Kawali, dan Panjalu dihapuskan. Semua daerah itu menjadi wilayah Kabupaten Galuh. Dengan demikian, Kabupaten Galuh memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu dari Cijolang sampai ke pantai selatan dan dari Citanduy sampai perbatasan Sukapura.

Setelah Adipati Jayanagara meninggal, kedudukannya sebagai bupati digantikan oleh Anggapraja. Akan tetapi tidak lama kemudian jabatan itu diserahkan kepada adiknya bernama Angganaya. Sementara itu, daerah Utama digabungkan dengan Bojonglopang, dikepalai oleh Wirabaya. Dipati Kertabumi yang semula memerintah Bojonglopang, dipindahkan ke Karawang dan menjadi cikal-bakal bupati Karawang.

Tahun 1645 setelah Sultan Agung meninggal, Amangkurat I putera Sultan Agung kembali melakukan reorganisasi wilayah Priangan. Wilayah itu dibagi menjadi beberapa daerah ajeg (setarap kabupaten), antara lain

Sumedang, Bandung, Parakan-muncang, Sukapura, Imbanagara, Kawasen, Galuh, dan Banjar.

Pada saat Sultan Agung memecah wilayah Galuh menjadi empat daerah, yaitu Utama, Bojonglopang (Kertabumi), Imbanagara, dan Kawasén. Wilayah Galuh dipecah lagi menjadi lima kabupaten, yaitu

Imbanagara, Bojonglopang, Utama, Kawasen, dan Banyumas. Salah satu pusat kekuasaan di Galuh adalah Kabupaten Imbanagara. Kabupaten Imbanagara berlangsung hingga tahun 1815. Daerah-daerah tersebut masuk kedalam wilayah Priangan Timur. Pemerintahan Mataram Sultan Agung wafat (1645) dilanjutkan oleh puteranya, yaitu Sunan Amangkurat I atau Sunan Tegalwangi (1645-1677).

Wilayah Mataram di bagian barat pada tahun 1656 – 1657 dibagi menjadi 12 Ajeg (setingkat Kabupaten), sembilan ajeg saat ini berada diwilayah Jawa Barat dan tiga ajeg saat ini termasuk wilayah Jawa Tengah.

Alasan Sunan Amangkurat I membagi daerah tersebut dikarenakan pasca pemberontakan Dipati Ukur di Priangan, khususnya di Priangan Tengah masih kacau. Disamping itu ada kekhawatiran terhadap kedudukan Kompeni Belanda di Batavia semakin kuat dan Banten sedang melebarkan kekuasaanya kewilayah timur. Oleh karena itu ia pun beranggapan untuk memperkuat Priangan Barat.

Sembilan ajeg yang berada diwilayah Jawa Barat tersebut, yakni :

1. Sumedang diperintah oleh Pangeran Rangga Gempol III.
2. Parakanmuncang diperintah oleh Tumenggung Tanubaya.
3. Bandung diperintah oleh Tumenggung Wiraangunangun.